

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, Bab 45 Pasal 480–495. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 16.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 245–274.
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/In/1966.

B. Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 62/Pid.B/2016/PN.Pya.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 387 K/Pid/2021.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2888 K/Pid.Sus/2018.
- Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1213/Pdt.G/2020/PA.Sda.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013.
- Penetapan Pengadilan Negeri Medan (dikutip dalam Lubis, 2023).
- Penetapan Pengadilan Agama Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs (dikutip dalam Kurniasih & Djajaputra, 2024).

C. Buku

- Hamzah, A. (2017). Delik-delik khusus di luar KUHP. Sinar Grafika.
- Juwana, H. (2018). Hukum pidana khusus. Rajawali Pers.

- Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Prasetyo, T. (2010). Hukum pidana. RajaGrafindo Persada.
- Setiono, H. (2011). Diskriminasi di bidang catatan sipil: Tinjauan catatan sipil dari perspektif sejarah, Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/In/1966, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. UPT UNS Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1991). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politeia.
- Zuhaili, W. (2011). Fiqh Islam wa adillatuhu. Dar al-Fikr.

D. Artikel Jurnal

- Afif, Z., Syapiq, M., Al Azmi, C., & Salam, A. (2024). Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran di Desa Sei Dua Hulu, Kec. Simpang Empat, Kab. Asahan. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1519–1524. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.25338>
- Andrianto, F. (2020). Kepastian hukum dalam politik hukum di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 114–123. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>
- Ananda, D., Rohimah, S., Susilo, B., Wulan, D., & Mustofa, A. (2022, September). Implementasi K-Means dalam pengelompokan data akta kelahiran di Indonesia. Dalam *Sentimas: Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* (hlm. 66–71).
- Benuf, C., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Darmawan, A., Fitriana, J., Setiawan, A. A., & Safira, A. S. (2022). Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. *Jurnal Bina Desa*, 4(3), 296–303. <https://doi.org/10.15294/jbd.v4i3.32542>
- Faisal, M. F. (2022). Analisis tindak pidana pemalsuan e-KTP. *Jurnal Kajian Hukum Universitas Sumatera Utara*, 3(2).
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–258.

- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak. *Prosiding KS: Riset & PKM*, 2(1), 135–146.
- Harahap, S. B. (2022). Birth certificate as authentic evidence of children's origin. *Legal Brief*, 11(5), 2693–2696. <https://doi.org/10.35335/legal.v11i5.537>
- Harahap, D. (2022). Tanggung jawab hukum atas tindakan pemalsuan data dalam pembuatan Kartu Keluarga (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2888 K/Pid.Sus/2018). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 3(1).
- Hariyoko, Y., Kusuma, L. H., & Soesiantoro, A. (2021). Pelayanan publik dalam pembuatan akta kelahiran (Studi kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo). *Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik*, 11(2), 114–121. <https://doi.org/10.38156/gjkmp.v11i2.104>
- Hawana, A., Aziz, H., & Hafidati, P. (2024). Perlindungan hukum bagi anak kawin siri dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan. *Jurnal Pemandhu*, 5(1), 151–173.
- Hidayati, N., & Sulistyowati, E. (2022). Analisis yuridis putusan nomor 1213/Pdt.G/2020/PA.Sda tentang pembatalan perkawinan dan akibatnya terhadap kedudukan anak. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 121–130.
- Hinonaung, K. (2020). Ketentuan pidana di bidang administrasi kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. *Lex Privatum*, 8(4).
- Ibrahim, R. S. (2018). Hak-hak keperdataan anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Jurnal Lex Privatum*, 6(2).
- Irwantoro. (2018). Pelayanan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 2(1), 49–58. <https://doi.org/10.21787/mp.2.1.2018.49-58>
- Iskandar, D., Zulbaidah, W. N., Almanda, A., & Abdinur, I. (2024). Perkembangan teori dan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. [Nama Jurnal], 1(3), 293–305.
- Kurniasih, H., & Djajaputra, G. (2024). Analisis hukum terhadap pelaksanaan adopsi anak dalam sudut pandang hukum positif pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs. *UNES Law Review*, 6(4), 10204–10218.
- Kurniawan, T. (2015). Peran parlemen dalam perlindungan anak. *Jurnal DPR*, 6(1), 38–48.

- Lestari, M. (2017). Hak anak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan. *UIR Law Review*, 1(2), 185–196.
- Livinus, S., & Rahmawati, M. (2018). Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan (Studi kasus: Penganiayaan anak adopsi di Hotel Le Meridien Jakarta Pusat oleh CW). *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1).
- Lubis, D. (2023). Analisis yuridis pengangkatan anak dan akibat hukumnya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(3), 110–125. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.397>
- Marlyna, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam kesalahan pengutipan akta kelahiran. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(2), 874–878.
- Maskur, A., Shabir, M., Hapsin, A., Rismana, D., & Purwanto, J. (2024). Optimizing legal protection: Addressing the disparity of sanctions regarding personal names in birth certificates as population documents. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 21–33. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i1.10521>
- Maulana, E., Amir, I., Sari, M., & Aris, I. (2024). Legal implications of the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XI/2013 on simplifying birth certificate registration procedures in Indonesia. *Constitutional Law Review*, 3(1), 19–37. <https://doi.org/10.30863/clr.v3i1.5602>
- Muhsin, R., Ilato, R., & Igirisa, I. (2024). Kualitas pelayanan publik dalam pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 147–169. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v1i4.181>
- Nabila, S. (2023). Tinjauan yuridis putusan bebas dalam tindak pidana pemalsuan akta kelahiran yang digunakan sebagai dasar melakukan jual beli tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 387 K/Pid/2021). *Jurnal Perspektif Hukum*, 4(1), 12–23.
- Navisa, F. D., & Dewi, A. H. S. M. (2020). Kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam sengketa hak atas tanah. *Tafaquh: Jurnal Hukum*, 193, 1–22.
- Nurhadi. (2018). Status nasab anak dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Al-Ahwal*.
- Oktavianti, F., Idham, & Prasetyasari, C. (2022). Analisis yuridis penegakan hukum tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum (Studi penelitian di Pengadilan Negeri Batam). *Ensiklopedia of Journal*, 5(1).

- Paputungan, M. (2024). Perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dalam perspektif normatif. [Nama Jurnal], 5(2). <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.150>
- Permana, D., Saepudin, E. A., & Kamilah, F. (2025). Reformulation and optimization of birth certificate services of the Population and Civil Registration Office Serang District. *Journal of Law Science*, 7(1), 159–166. <https://doi.org/10.35335/jls.v7i1.6029>
- Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa, D. J., Sopacua, M. G., & Fuady, M. I. N. (2022). Tindak pidana dalam KUHP.
- Prasetyo, T. (2022). Implikasi hukum pemalsuan dokumen kependudukan terhadap status anak. *Jurnal Hukum IUS*.
- Rahardjo, M. (2011). Metode pengumpulan data penelitian kualitatif.
- Ricard Achmad, W., Suhadi, & Luhfitasari, R. (2020). Penegakan hukum terhadap penduduk luar Kota Balikpapan yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 2×24 jam yang berdomisili di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, 2(1).
- Rihardi, S. A. (2018). Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak perempuan sebagai korban eksploitasi seksual. *Jurnal UNTIDAR*, 2(1), 1–15.
- Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. (2025). Pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 34–47.
- Sandjojo, N. I., & Hernoko, A. Y. (2018). Akibat hukum pembatalan akta kelahiran terhadap anak. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 23(2), 84–93.
- Sukawantara, G. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 220–226.
- Sulistiyawati. (2019). Pengangkatan anak oleh keluarga Muslim di Pengadilan Negeri pasca perubahan Undang-Undang Peradilan Agama (Sebuah analisis asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan). *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1(1), 58–85.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2464–2480.
- Utami, W., & Listyowati, P. R. (2021). Analisis yuridis kedudukan anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.
- Wahidmurni, W. (2017). Pemaparan metode penelitian kualitatif.

E. Skripsi dan Tesis

Iswanto, F. (2020). Keabsahan nasab berdasarkan akta kelahiran menurut hukum Islam dan hukum positif [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah].

F. Laporan dan Dokumen Resmi

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. (2022). Laporan tahunan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022. <https://dukcapil.go.id>

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Laporan tahunan KPK 2023: Korupsi melalui pemalsuan dokumen. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/laporan-tahunan>

Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. (t.t.). Data kepemilikan akta kelahiran anak.

GoodStats Data. (2023). Provinsi dengan persentase anak yang memiliki akta kelahiran tertinggi 2023. <https://data.goodstats.id>

G. Instrumen Internasional

United Nations. (1989). Convention on the rights of the child. United Nations Treaty Collection. <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-rights-convention>

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

H. Al-Qur'an

Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab ayat 5 (tentang penetapan nasab anak).